

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 10

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, diperlukan pengarusutamaan gender menjadi strategi lintas bidang dalam pembangunan selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan daerah;
- b. bahwa rencana aksi daerah penyelenggaraan pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024 - 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia.
6. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, selanjutnya disingkat RAD PUG, adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu 2024-2028.
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur intern maupun ekstern organisasi yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RAD PUG digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender.
- (2) Tujuan disusunnya RAD-PUG adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PUG; dan mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Pengarusutamaan Gender secara terpadu untuk diimplementasikan secara rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 3

- (1) RAD PUG terdiri atas 12 (dua belas) bidang aksi.
- (2) Bidang aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Sosial;
 - f. Bidang Ekonomi;
 - g. Bidang Politik;
 - h. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;

- j. Bidang Perhubungan;
- k. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- l. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Rincian RAD PUG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan perempuan dan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.

Pasal 6

Pendanaan penyelenggaraan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

DWIE ANDYARINI DIAN ARGA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
 PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN
 GENDER TAHUN 2024 - 2028

A. Rencana Aksi Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2024 - 2028

No	Rencana Aksi(Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	KondisiAwal tahun2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD PengampuUrusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
	PeningkatanIPG									
1	Program PengarusUtamaan Gender dan PEMBERDAYAAN Perempuan.	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	%	11,5	13	15,5	17	18,5	20	Seluruh OPD
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat/ Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi /advokasi Pemberdayaan Perempuan	%	40,00	40,00	55,00	60,00	65,50	70	Kesbangpol, Setwan, Dinsos, Dispora, Disdik, Disnaker, DPPKB, DPPPA, Disparbud, Disdagperin
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	orang	90	90	100	100	150	150	Kesbangpol, Setwan, , DPPPA,

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu	Kelompok	4	4	6	8	8	10	DPPA, Dinkes, RSUD, Kecamatan
		Jumlah peserta gender champion yang mendapat penghargaan	Orang	4	4	6	6	8	8	Setda, Kesbangpol, DPPPA, DPPKB, Dinsos, Disnaker, Kecamatan
	Program peningkatan peran partai politik dan organisasi masyarakat melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah parpol dan organisasi masyarakat yang mengikuti Pendidikan politik	lembaga	30	30	40	40	50	50	Kesbangpol, Setwan

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis yang dirumuskan	Dok	3	3	4	4	5	5	Setda, Bappelitbangda, Kesbangpol, Setwan
	Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan Kaucus politik perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan caucus politik perempuan	orang	200	200	250	250	300	300	Kesbangpol
	Jumlah peserta mengikuti pendidikan politik bagi perempuan dan peningkatan partisipasi politik	Jumlah peserta Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi politik perempuan	orang	200	200	250	250	300	300	Kesbangpol

B. Rencana Aksi Bidang Pendidikan Tahun 2023 - 2027

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	Bidang Pendidikan									
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan	%	76,37	80,17	83,97	89,5	100	100	Pendidikan
a	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan PAUD									Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pengadaan perlengkapan PAUD	Sekolah	6	8	8	10	10	12	Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)	PAUD	778	778	780	780	785	787	Pendidikan
	Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah TK negeri yang difasilitasi	TK	10	10	10	12	12	13	Pendidikan
		Jumlah Penerima dana Hibah	PAUD	778	778	780	780	785	787	Pendidikan
	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									
	Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personil jenjang pendidikan dasar	Siswa	-	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800	Pendidikan
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	siswa	-	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personil jenjang pendidikan dasar	Siswa	-	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800	Pendidikan

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Siswa	-	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD/MI yang diadakan	Paket	69	71	71	71	71	71	71
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD/MI yang difasilitasi penyelenggaraan AKM	SD	146	102	102	102	102	102	Pendidikan
		Jumlah penyelenggara SD inklusi	sekolah	4	-	-	-	-	-	Pendidikan
		Jumlah SD/MI penyelenggara UAS yang difasilitasi	sekolah	146	-	-	-	-	-	Pendidikan
		Penyusunan soal UAS SD/MI	kegiatan	1	-	-	-	-	-	Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan survey karakter	sekolah	-	102	102	102	102	102	Pendidikan
	Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOS SD	Jumlah SD negeri yang mendapatkan BOS	SD	71	71	71	71	71	71	Pendidikan
	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan SMP									Dinas Pendidikan
	Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Jumlah peserta didik jenjang SMP yang difasilitasi biaya personil peserta didik	Siswa	-	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan (IKK Output)	Siswa	-	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Siswa	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga Siswa SMP/MTs yang diadakan	Paket	27	11	17	17	17	17	

	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan UAS	sekolah	38	38	38	38	38	38	
--	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------	----	----	----	----	----	----	--

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan AKM	sekolah	38	38	38	38	38	38	
		Jumlah SMP yang difasilitasi pendidikan karakter SMP	sekolah	38	38	38	38	38	38	
		Jumlah SMP yang difasilitasi FOP SMP	sekolah	38	38	38	38	38	38	
	Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOS SMP	Jumlah SMP Negeri penerima dana BOS	Sekolah	17	17	17	17	17	17	17
	Pengelolaan Pendidikan Non formal /Kesetaraan								V	Dinas Pendidikan
	Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik kesetaraan	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personal peserta didik kesetaraan/nonformal	peserta didik	-	150	200	250	300	350	Pendidikan
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan (IKK Output)	peserta didik	-	300	350	400	450	500	Pendidikan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga pendidikan kesetaraan/nonformal yang diadakan	Unit	-	20	10	10	10	10	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A B C	org	310	-	-	-	-	-	
		Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi pelaksanaan UNPK	lembaga	17	-	-	-	-	-	
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan AKM	lembaga	-	13	13	13	13	13	
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan Survei Karakter	lembaga	-	13	13	13	13	13	
		Jumlah Mapel Kesetaraan yang terfasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya	mapel	-	14	14	14	14	14	

	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan EDS	Lembaga	-	13	13	13	13	13	Pendidikan
--	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------	---	----	----	----	----	----	------------

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan RAPBS	Lembaga	-	13	13	13	13	13	Pendidikan
	Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	Jumlah satuan PNF yang menerima dana hibah BOP	Lembaga	-	14	14	14	14	14	14

C.

C. Rencana Aksi Bidang Kesehatan Tahun 2023 - 2027

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	Bidang Kesehatan									
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	78	78	80	85	90	95	Kesehatan Dan RSUD
		Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	Kesehatan Dan RSUD
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	%	85	85	90	95	100	100	Kesehatan Dan RSUD
a	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									Kesehatan Dan RSUD

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	87,7	87,7	90	95	100	100	Kesehatan Dan RSUD
		Jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Orang	6.182	6.220	6.262	6.307	6.357	6.392	Kesehatan
		Jumlah kasus anemia	Orang	519	512	506	499	493	486	Kesehatan

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		pada ibu hamil								
		Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Orang	8	7	6	5	4	3	Kesehatan
		Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K1/K4 sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6.481	6.513	6.555	6.600	6.650	6.685	Kesehatan
		Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Orang	118	112	112	106	100	93	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil (IKK Output)	Set	16	17	18	19	20	21	Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	6.182	6.220	6.262	6.307	6.357	6.392	Kesehatan
		Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Bayi	5.912	5.932	5.952	5.972	5.992	6.012	Kesehatan

		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar (IKK Output)	Set	15	16	17	18	19	20	Kesehatan
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	-----------

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		Jumlah kasus obesitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Fasyankes	Jiwa	59.375	59.380	59.385	59.390	59.395	59.400	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)	Set	22	23	24	25	26	27	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)	Set	36	37	38	39	40	41	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)	Set	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi ODGJ berat (IKK Output)	Set	159	160	161	162	163	164	Kesehatan

		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)	Set	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik	Unit	177	178	179	180	181	182	Kesehatan

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		kesehatan yang tersedia untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)								
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)	Orang	241	271	291	311	331	341	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)	Orang	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)	Orang	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi penderita ODGJ berat (IKK Output)	Orang	159	160	161	162	163	164	Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)	Orang	159	160	161	162	163	164	Kesehatan

		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	177	178	179	180	181	182	Kesehatan
--	--	----------------------------------------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

	Operasional	Jumlah bulan penyediaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	Kesehatan
--	-------------	-------------------------	-------	----	----	----	----	----	----	-----------

	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pembinaan fasyankes baik milik pemerintah maupun swasta	Kali	68	68	69	70	71	72	Kesehatan
		Jumlah pertemuan fasilitasi peningkatan	Kali	10	10	11	11	12	12	Kesehatan

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		mutu fasyankes								
		Jumlah pelaksana kegiatan P3K dan bencana	Orang	800	800	800	800	800	800	Kesehatan
		Jumlah pelaksanaan visitasi perijinan fasyankes	Kali	10	10	10	10	12	12	Kesehatan
		Jumlah pendampingan akreditasi fasyankes	Kali	-	2	2	2	2	2	Kesehatan
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									Kesehatan
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah unit Puskesmas yang dibangun	Unit				1	1	1	Kesehatan
										Kesehatan
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat kesehatan Labkesda yang diadakan	Paket	1	1	1	1	1	1	Kesehatan
		Jumlah unit Labkesda yang dibangun	Unit	1	-	-	-	-	-	Kesehatan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pertemuan fasilitasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber DAK	Kali	8	8	8	8	8	8	Kesehatan
		Jumlah Puskesmas/pustu yang direhabilitasi/dipelihara	Lokasi		7	7	4	7	7	Kesehatan
		Jumlah DE yang disusun				1				Kesehatan

		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan	Lokasi		14	14	14	14	14	Kesehatan
--	--	----------------------------------------------	--------	--	----	----	----	----	----	-----------

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		secara rutin								
		Jumlah IPAL Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin			14	14	14	14	14	Kesehatan
		Jumlah Genset Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin			14	14	14	14	14	Kesehatan
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas keliling roda 2 yang diadakan bersumber DAK	Unit	13	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Jumlah puskesmas keliling roda 4 yang diadakan bersumber DAK	Unit	-	1	1	1	1	1	Kesehatan
		Pengadaan ambulan PSC (DAK)	Unit	-	1	-	-	-	-	Kesehatan
										Kesehatan
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah instalasi pengolahan limbah yang diadakan (DAK)								Kesehatan
		Pembangunan gedung PSC (DAK)	Unit	-	-	-	-	-	-	Kesehatan
		Pengadaan sistem informasi PSC (DAK)	Unit	-	-	-	-	-	-	Kesehatan
										Kesehatan
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAU)	Unit	4	6	8	8	10	10	Kesehatan
		Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	Paket	62	50	50	50	50	50	Kesehatan

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		(DAK)								
										Kesehatan
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rehabilitasi puskesmas/pustu	Lokasi	4	4	4	4	4	4	Kesehatan
		Jumlah DE yang disusun								Kesehatan
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda, Dinkes) yang dikalibrasi	Unit	208	210	220	220	230	230	Kesehatan

		Jumlah pemberdayaan Pondok Pesantren yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	Kesehatan
		Jumlah kegiatan kesehatan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kecamatan	12	12	12	12	12	12	Kesehatan

	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Lomba PHBS Tingkat Kota yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	1	Kesehatan
--	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	-----------

	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan	Unit	11	83	20	12	5	30	DP3KB
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS dari Keluarga Miskin yang	Orang	400	440	480	520	560	560	DP3KB

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		mendapat pelayanan KB								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	%		17	16	15	14	13	DP3KB
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									DP3KB
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan/fasilitasi PPKBD, KKB, Kelompok Kegiatan, Rumah Data Kependudukan dan PPKS	Kegiatan	3	5	5	5	5	5	DP3KB

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									Sosial
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

F. Rencana Aksi Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2024 - 2028

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	Ketenagakerjaan									
	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	persentase	0,285	0	0	0	0	0	Ketenaga kerjaan
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									Ketenaga kerjaan
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pelatihan untuk buruh rokok (DBHCHT) yang diselenggarakan	kali	1	1	1	1	1	1	Ketenaga kerjaan
		Jumlah Perusahaan yang mengadakan kemitraan MOU dg BLK melalui kios 3 in 1	Perusahaan	12	16	16	16	16	16	Ketenaga kerjaan
		Jumlah penganggur yang dilatih	orang	0	240	256	272	288	304	Ketenaga kerjaan
		Lulusan bersertifikat kompetensi	orang	0	48	48	48	48	48	
	2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	persentase	19	21	23	25	27	29	Ketenaga kerjaan
	Kegiatan : Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota									Ketenaga kerjaan
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah job fair online yang diselenggarakan		1	0	0	1	1	1	Ketenaga kerjaan
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lokasi pelaksanaan padat karya	lokasi	0	3	3	3	3	3	Ketenaga kerjaan
Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar Dalam Satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)		KK	0	3	3	3	3	3	Ketenaga kerjaan	

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		Jumlah Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB)	WUB	0	10	10	10	10	10	Ketenaga kerjaan
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									Ketenaga kerjaan
	Job Fair/Bursa Kerja	jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan job fair	perusahaan	0	20	25	30	35	35	Ketenaga kerjaan
		Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab/Kota (IKK Output)	lowongan kerja	0	100	150	200	250	250	Ketenaga kerjaan
2	Koperasi dan UMKM									
	1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	persentase	24,59	29,41	30,94	31,49	32,36	33,23	Koperasi dan UMKM
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									Koperasi dan UMKM
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP/KSPPS/USPPS yang dinilai kesehatannya	koperasi	-	100	100	100	100	100	Koperasi dan UMKM
		Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	koperasi	100	100	100	100	100	100	Koperasi dan UMKM
	2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persentase	38,36	0	0	0	0	0	Koperasi dan UMKM
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi									Koperasi dan UMKM

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
	Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntan berbasis Teknologi Informasi	koperasi	-	10	10	10	10	10	Koperasi dan UMKM
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	koperasi	-	25	25	25	25	25	Koperasi dan UMKM
		Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi	koperasi	-	25	25	25	25	25	Koperasi dan UMKM
		Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan koperasi	koperasi	-	2	2	2	2	2	Koperasi dan UMKM
	3. Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha	persentase	11,85	11,95	12,06	12,16	12,27	12,37	Koperasi dan UMKM
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									Koperasi dan UMKM
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	UMKM	90	90	90	90	90	90	Koperasi dan UMKM
		Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan	event	-	1	-	1	-	1	Koperasi dan UMKM
		Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	UMKM	60	60	60	60	60	60	Koperasi dan UMKM
		Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif	UMKM	20	20	20	20	20	20	Koperasi dan UMKM
		Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses pembiayaan permodalan	UMKM	-	40	40	40	40	40	Koperasi dan UMKM

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
		Jumlah usaha mikro yang mendapat sosialisasi fasilitasi penguatan kelembagaan sentra	UMKM	-	20	20	20	20	20	Koperasi dan UMKM
		Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha	UMKM	-	40	40	40	40	40	Koperasi dan UMKM
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									Koperasi dan UMKM
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5	orang	120	120	120	120	120	120	Koperasi dan UMKM
3	Penanaman Modal									Penanaman modal
	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	Penanaman modal
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									Penanaman modal
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	dokumen	-	1	-	1	1	-	Penanaman modal
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Peluang dan Potensi investasi yang disusun dan di update	dokumen	1	1	1	1	1	1	Penanaman modal

2. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase	50	100	100	100	100	100	Penanaman modal
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------

H. Rencana Aksi Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 - 2028

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan buka jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%		93,99	95,86	97,78	98,74	99	
a.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									
1)	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah revitalisasi sarana dan prasarana air bersih	lokasi	3	-	-	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah SR yang terlayani jaringan perpipaan	SR	320	320	320	320	320	320	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah sarpras air bersih yang direvitalisasi	lokasi	3	3	3	3	3	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional									
a.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									
1)	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah keikutsertaan peserta Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Orang	-	25	25	25	25	25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah									
a.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1)	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk pelayanan dasar menggunakan SPALD-T (IKK Output)	unit	-	2	2	2	2	2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

I. Rencana Aksi Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024 - 2028

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	ha		0	0	0	0	0	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota									
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	-	300	300	300	300	300	Perumahan Rakyat dan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
	Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah perumahan yang telah menyerahkan aset PSU	Unit	-	10	10	10	10	10	Perumahan Rakyat dan Permukiman

K. Rencana Aksi Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 - 2028

	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Tahun					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	Program Pendaftaran Penduduk	1. Cakupan Penertbitan KTP	%							Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Cakupan Penerbitan KTP	%							
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1. jumlah penerbitan KTP dalam 1 tahun	Jumlah KTP	30.200	31.000	31.000	30.000	32.100	32.100	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. jumlah penerbitan KK dalam 1 tahun	Jumlah KK	25.100	26.200	28.000	30.200	32.000	32.000	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen audit dan surveillance ISO	Dok	1	1	1	1	1	1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA (IKK Outcome)	%	50	55	60	65	70	75	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%							
		2. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%							
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil									
	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1. jumlah penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak (IKK Outcome)	Jumlah Akta Kelahiran	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. jumlah penerbitan Kutipan Akta Kematian dalam 1 tahun (IKK Output)	Jumlah Akta Kematian	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1. jumlah penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dalam 1 tahun (IKK output)	Jumlah Akta Perkawinan	50	50	50	50	50	50	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. jumlah penerbitan Kutipan Akta Perceraian dalam 1 tahun (IKK Output)	Jumlah Akta Perceraian	10	10	10	10	10	10	Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Tahun					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan KTP	%							
		2. Cakupan Penerbitan KK	%							
		3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%							
		4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%							
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
	Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah Rapat Koordinasi pelaporan Kependudukan yang dilaksanakan	Keg	2	2	2	2	2	2	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan)	Buku	96	96	96	96	96	96	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk	Unit	-	-	1	-	-	-	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4. jumlah pemeliharaan perangkat keras SIAK	Unit	-	-	5	5	5	5	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan	Keg	1	1	1	1	1	1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	1. Jumlah arsip Permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)	Jumlah Arsip Permohonan	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara penjilidannya (berupa penjilidan)	Jumlah Arsip register	112	112	112	112	112	112	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Jumlah Fumigasi Arsip	Jumlah Arsip	1	1	1	1	1	1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2023	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
4	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penghargaan lomba Posyandu								
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan kader Ketahanan Keluarga dan kader PATBM tingkat Kelurahan	orang	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	DPPPA
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan pengaduan pengasuhan anak dan konseling perkawinan yang terlayani	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPPPA
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pengaduan pengasuhan anak dan konseling perkawinan yang dilaksanakan	kali	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	DPPPA
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase dekela (desa/kelurahan layak anak	%		100	27,68	51,79	75,89	100	DPPPA
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SRA	%	9,98	10,18	10,37	10,57	10,76	10,96	DPPPA

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dan advokasi Menuju Kota Layak Anak	orang	100	100	100	150	150	150	DPPPA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan	Kelurahan	56,00	DPPPA						
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

No	Rencana Aksi (Program/ Kegiatan)	Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD Pengampu Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	
5		Jumlah Lembaga APSAI yang dibentuk	lembaga	0,00	1	1	1	1	1	DPPPA
		Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan	kali	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DPPPA
		Jumlah dokumen Perwal RAD yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	DPPPA
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%		100	100	100	100	100	DPPPA
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus ABH yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	DPPPA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	Kali		13	13	13	13	13	DPPPA
		Jumlah pemberian konseling pengasuhan anak dan permasalahan keluarga	Kali		6	6	6	6	6	DPPPA

	Jumlah pendampingan orang tua dan anak beresiko/rentan yang dilaksanakan	kali		4	4	4	4	4	DPPPA
--	--------------------------------------------------------------------------	------	--	---	---	---	---	---	-------

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

DWIE ANDYARINI DIAN ARGA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 10